**TINJAUAN YURIDIS PENYEWAAN PULAU DI WILAYAH KEDAULATAN
REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PIHAK ASING BERDASARKAN
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
(UNCLOS) 1982**

Oleh : Prima Agung Hermanda

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Widia Edorita,SH.,M.H

Email : prima_agung00@gmail.com - Telepon : 0838 0072 8910

ABSTRACT

Island rentals in Indonesia to foreign parties violate the principles of an island nation that emphasizes the integration between land, sea and air dimensions in carrying out national development. It can also eliminate the integration of the sea dimension or waters in national development. in the National Long-Term Development Plan (RPJPN), one of the points of the long-term development mission is to realize Indonesia as an archipelago / maritime country, while the nation's predecessors have fought steadily so that the principles of the island nation are recognized by international world as stated in UNCLOS 1982.

This type of research used in writing this law is normative legal research that focuses on principles by formulating legal principles, both from social data and from positive written legal data. Whereas when viewed from the nature of this research is descriptive. this study uses secondary data, namely data that has been prepared.

The results of this study are island leasing in the territory of the Republic of Indonesia sovereignty against foreign parties based on the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) in the form of usufructuary rights and leases based on legislation that applies in the Republican sovereignty Indonesia. Indonesian foreign parties are given authority over island rentals as limited as managers. However, some foreign parties have exceeded the authority given to the detriment of the local people who are the people of Indonesia. Island leasing in the territory of the Republic of Indonesia sovereignty against foreign parties based on positive law in Indonesia has not been able to accommodate the interests of the Indonesian people in accordance with the 1945 Constitution. Island leasing to foreign parties is more oriented towards seeking profits to increase state income and naturally eliminate the rights of local communities over natural resources of Indonesian waters.

Keywords: Island Rental, Foreign Parties, UNCLOS 1982

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mencatat toggak sejarah baru di bidang hukum laut dan memperkokoh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 13 Desember 1957 yaitu Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengeluarkan sebuah pernyataan (deklarasi) mengenai wilayah perairan NKRI yaitu bentuk geografi Indonesia sarbagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat corak tersendiri. Bagi keutuhan territorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta laut terlentak diantaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Tetapi, penentuan batas laut territorial seperti termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) *Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonnantie* 1993 tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan territorialnya sendiri-sendiri.

Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 ini menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah laut sekitar, diantara, dan di dalam kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*archipelagic state*) yang pada saat itu mendapat pertentangan dari beberapa negara lain, sehingga laut-laut antar pulaupun merupakan wilayah NKRI dan bukan wilayah bebas.

Pengertian kedaulatan negara atas perairan tidak sama dengan kedaulatan negara atas daratannya karena adanya pasal-pasal lain yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengharuskan

dihormatinya hak-hak yang ada dan kepentingan yang sah dari negara-negara lain yang berkepentingan terhadap negara kepulauan ini. Di dalam Bab IV UNCLOS 1982 pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 54 secara khusus mengatur tentang negara-negara kepulauan. Masyarakat internasional telah mengakui ada bagian laut yang karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. Perairan kepulauan berada di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan, pada dasar laut perairan kepulauan dan tanah di bawahnya.

Wawasan nusantara yang dalam status yuridisnya adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) sudah diakui oleh masyarakat internasional dengan adanya Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 yang diatur dalam Bab IV Pasal 46 yang berbunyi:

1. “*Archipelagic state means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other island.*”
2. *Archipelago means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such”.*

Dalam konvensi inilah konsep negara kepulauan diterima dan dijadikan salah satu bagian dari konvensi, sehingga Indonesia menjadi salah satu delegasi yang menandatangani *United Nations Convention on the Law of the Sea*

(UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) tanggal 31 Desember 1985.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang sangat signifikan dengan diakuinya hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.¹ Khusus UNCLOS 1982, Indonesia bukan hanya mendapatkan tambahan wilayah, konvensi ini mempunyai arti penting karena untuk pertama kalinya asas Negara kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia, telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional.²

Pada Pasal 49 UNCLOS 1982 mengatur tentang status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Ketentuan tentang kedaulatan tersebut antara lain:

1. Kedaulatan suatu negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal 47, disebut sebagai perairan kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di

bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

3. Kedaulatan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab ini.
4. Rezim lintas alur laut kepulauan yang ditetapkan dalam Bab ini bagaimanapun juga tidak boleh di bidang lain mempengaruhi status perairan kepulauan, termasuk alur laut, atau pelaksanaan kedaulatan oleh Negara kepulauan atas perairan demikian dan ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 49 UNCLOS 1982 tersebut dapat diketahui bahwa setiap negara kepulauan memiliki kedaulatan atas ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Setiap negara kepulauan memiliki hukum masing-masing di dalam mengatur negaranya. Begitu juga di dalam kegiatan penyewaan tanah dan pulau yang ada di Indonesia.

Penyewaan pulau di Indonesia kepada pihak swasta melanggar prinsip-prinsip negara kepulauan yang menekankan adanya keterpaduan antara matra darat, laut dan udara dalam melakukan pembangunan nasional. Juga dapat menghilangkan keterpaduan matra laut atau perairan dalam pembangunan nasional. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) salah satu poin misi pembangunan jangka panjang adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim, sedangkan para pendahulu bangsa ini telah memperjuangkan secara gigih agar prinsip-prinsip negara kepulauan ini diakui oleh dunia internasional seperti yang sudah tertuang dalam UNCLOS 1982.

¹*Ibid*, hlm. 217.

²Rohkmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.3.

Di Indonesia sudah banyak pulau-pulau yang dikelola dan dikuasai oleh Warga Negara Asing (WNA). Rata-rata pulau yang dikuasai oleh pihak asing merupakan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah tutorial NKRI. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, negara bertanggungjawab atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan.³

Indonesia memperoleh pihak asing mengelola pulau untuk kepentingan seperti mengelola hotel, tempat pariwisata dan lainnya, akan tetapi tetap memberikan ruang bagi warga masyarakat di sekitar lokasi untuk memanfaatkan yang ada atau yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap pulau yang disewa dan diolah oleh pihak asing, negara memiliki peranan penting dalam membuat kebijakan karena memiliki kedaulatan di wilayahnya. Pemerintah Indonesia masih kurang menaruh perhatian terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia yang sudah dikelola oleh pihak asing, sehingga terdapat pihak asing yang semena-mena terhadap warga negara Indonesia.

Terdapat beberapa kasus mengenai pihak asing yang menyewa pulau Indonesia dan bersikap semena-mena terhadap warga negara Indonesia yang antara lain adalah diusirnya wisatawan lokal ke pulau Bakungan atau *Virgin Cocoa* di Berau

³Penjelasan Umum Paragraf 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kalimantan Timur.⁴ Kemudian salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diusir dari sebuah pulau pribadi di sekitar pulau Mentawai Sumatera Barat.⁵

Padahal pulau-pulau yang ada di Indonesia tidak bisa dimiliki oleh orang asing maupun badan hukum asing, sudah jelas dibunyikan dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 bahwasanya hak atas tanah yang dapat diperoleh orang asing serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hanyalah hak pakai dan hak sewa.⁶ Bahkan untuk pihak asing yang menyewa dan mengelola pulau-pulau di wilayah Indonesia, negara tetap mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengaturan serta melakukan pengawasan terhadap wilayahnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyewaan pulau di wilayah kedaulatan Republik Indonesia terhadap pihak asing berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982?
2. Bagaimanakah penyewaan pulau di wilayah kedaulatan Republik Indonesia terhadap pihak asing berdasarkan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyewaan pulau di wilayah kedaulatan Republik Indonesia terhadap pihak asing berdasarkan *United*

⁴<https://www.hipwee.com/pulau-dikuasai-asing>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

⁵<https://www.rilis.id/diusir-orang-asing-dinegeri-sendiri>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

⁶Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

- b. Untuk mengetahui penyewaan pulau di wilayah kedaulatan Republik Indonesia terhadap pihak asing berdasarkan hukum positif di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sayarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai penyewaan pulau di wilayah kedaulatan Republik Indonesia terhadap pihak asing berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan salah satu unsur eksistensi sebuah negara.⁷ Dari sudut ilmu bahasa, kedaulatan dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.⁸ Menurut Paul Laband dan George Jellinek dalam teori kedaulatan negaranya, adanya negara adalah merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu. Kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya suatu negara. Jadi jelaslah

⁷Suryo Sakti Hadiwijoyo, *op.cit*, hlm.103

⁸Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2004, hlm. 188.

bahwa negara merupakan sumber dari kedaulatan.⁹ Hukum itu mengikat karena yang demikian dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak.¹⁰ Untuk dapat dikatakan sebagai suatu negara, apabila telah memenuhi unsur-unsur: penduduk yang tetap, wilayah dengan batas-batas yang jelas, pemerintahan yang efektif dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.¹¹

Menurut Hans Kelsen, sumber pedoman tersebut bersumber dari *grundnorm* (norma dasar). *Grundnorm* menyerupai sebuah pengandaian tentang tatanan yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama (dalam hal ini negara) dengan menggunakan konsep *Stufenbau* (lapisan-lapisan aturan menurut eselon).¹²

2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan

⁹Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.170

¹⁰Widia Ulan Dini, Sudiarto dan Aris Munandar, Status Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah oleh Warga Negara Asing yang Diperoleh Melalui Pelelangan Obyek Hak Tanggungan, *Jurnal Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. V No 2, 2017, hlm. 323.

¹¹Ida Kurnia, Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2 No. 1, 2008, hlm. 46.

¹²Vina Jayanti dan I Nyoman Wita, Hak Warga Negara Asing Atas Penguasaan Tanah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 2, 2011, hlm. 34.

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.¹³

Kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.¹⁴ Kebijakan publik sebagai apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.¹⁵

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada asas-asas dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.¹⁶ Sedangkan

¹³Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm 81.

¹⁴Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 6.

¹⁵Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hlm.19.

¹⁶Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 48.

jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. *United Nations Convention on the Law of the Sea* Tahun 1982.
- c. *Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonnantie* Tahun 1993.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus.

3) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyewaan Pulau di Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia Terhadap Pihak Asing Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*

Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:ekstern, intern dan teritorial. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan,tekanan atau pengawasan dari negara lain. Aspek intern kedaulatan adalah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh

dan eksklusif yang dimiliki oleh warga negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.¹⁷

Konsep negara kepulauan mulai diterima oleh negara di dunia internasional melalui regulasi yang disepakati dalam UNCLOS di Jamaica pada tahun 1982, pada bab IV Pasal 46 dijelaskan secara jelas bahwa negara kepulauan merupakan konsep yang dimiliki suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan kepulauan yang dimaksud dalam UNCLOS berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, wujud alamiah yang berhubungan satu sama lain sedemikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang secara historis dianggap demikian.¹⁸

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, adanya konferensi hukum laut 1982 (UNCLOS 1982) yang diselenggarakan PBB di Montego Bay Jamaica telah membawa pengaruh baru dalam wawasan internasional. Adanya kesepakatan sebagai konvensi mempunyai arti penting, karena untuk pertama kalinya asas negara kepulauan yang merupakan konsep dari bangsa Indonesia, telah berhasil memperoleh pengaturan resmi dari masyarakat internasional. Pengaturan itu dikatakan penting karena merupakan langkah lanjut secara internasional dalam rangka menciptakan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan Wawasan Nusantara yang termaktub dalam Ketetapan Majelis

¹⁷Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 24.

¹⁸Ogiso, *op.cit*, hlm.70.

Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menjadi bahan dasar bagi perwujudan kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Ketentuan Pasal 46 UNCLOS 1982 menetapkan definisi negara kepulauan dan kepulauan, sebagai berikut :

- a. Negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain;
- b. Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sedemikian.

Dengan diterimanya prinsip negara kepulauan sebagai salah satu lembaga dalam hukum laut internasional sebagaimana termuat dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut 1982, maka masalah status hukum negara kepulauan menjadi pasti. Dengan telah dimasukkannya Pasal 46 sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut 1982, perjuangan Negara kepulauan untuk menjaga kepentingan-kepentingan politik, keutuhan wilayah, ekonomi dan sosialnya telah mendapatkan dasar hukum dengan diakuinya kedaulatan Negara kepulauan di perairan kepulauan. Ketentuan tersebut diatas merupakan penegasan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 2.

Menurut Pasal 2 UNCLOS 1982, yaitu:

1. Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman, dan dalam hal suatu negara kepulauan atas perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya.
3. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan-peraturan lainnya dari hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 49 UNCLOS 1982 dapat diketahui bahwa setiap negara kepulauan memiliki kedaulatan atas ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Setiap negara kepulauan memiliki hukum masing-masing di dalam mengatur negaranya. Begitu juga di dalam kegiatan penyewaan tanah dan pulau yang ada di Indonesia.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorialnya. Masyarakat internasional telah mengakui bahwa ada bagian laut yang karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. Perairan kepulauan ini ada di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. Kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan, pada dasar laut perairan kepulauan dan tanah di bawahnya.

Indonesia memiliki kedaulatan atas pulau-pulau yang terdapat di dalamnya. Begitu juga atas

penyewaan pulau yang ada di Indonesia kepada pihak asing. Di Indonesia sudah banyak pulau-pulau yang dikelola dan dikuasai oleh Warga Negara Asing (WNA). Rata-rata pulau yang dikuasai oleh pihak asing merupakan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah teritorial NKRI. Tetapi, masih terdapat beberapa permasalahan atau kasus yang timbul akibat penyewaan pulau kepada pihak asing ini.

Alasan rencana menyewakan pulau yang digunakan pemerintah awalnya adalah untuk mencari jalan alternatif keluar dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah beralasan dari pada ribuan pulau kecil yang terlantar dan tidak berpenghuni lebih baik disewakan untuk menambah penghasilan negara sekaligus untuk membayar utang luar negeri. Alasan lain dari pemerintah melakukan penyewaan pulau adalah alasan konservasi. Namun, dalam prakteknya penyewaan pulau ke pihak asing umumnya dilandasi dengan kepentingan bisnis dari pada konservasi. Sehingga alasan konservasi yang digunakan pemerintah sangat bertentangan dengan kenyataannya.

Terdapat beberapa kasus mengenai pihak asing yang menyewa pulau Indonesia dan bersikap semena-mena terhadap warga negara Indonesia yang antara lain adalah diusirnya wisatawan lokal ke pulau Bakungan atau *Virgin Cocoa* di Berau Kalimantan Timur.¹⁹ Kemudian salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diusir dari sebuah pulau pribadi di sekitar pulau

Mentawai Sumatera Barat.²⁰ Umumnya pulau-pulau yang disewakan ke pihak asing adalah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Begitu juga yang terjadi di Pulau Cubadak yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, provinsi Sumatera Barat yang dikelola oleh pihak asing. Warga asing yang mengelola pulau tersebut bersikap kurang sopan dan bahkan pernah mengusir petinggi Polri dan pejabat pemerintahan. Kejadian ini telah direkam oleh warga dan telah diunggah ke media sosial. Kejadian ini menunjukkan bahwa warga asing yang mengelola pulau tersebut seakan-akan memiliki hak milik terhadap pulau yang disewanya.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 49 UNCLOS 1982 menunjukkan bahwa kedaulatan negara kepulauan meliputi seluruh wilayah perairannya, termasuk ruang udara di atasnya, dasar lautan tanah dibawahnya serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Indonesia memiliki kedaulatan yang penuh atas pulau-pulau yang ada di dalamnya termasuk pulau yang disewakan kepada pihak asing. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengambil tindakan yang tegas atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak asing yang telah diberikan hak sewa pulau kepadanya tetapi pihak asing tersebut telah menyalahgunakan hak sewa pulau tersebut bahkan pihak asing melakukan hal-hal yang diluar wewenang pihak asing tersebut. Pemerintah Indonesia dapat memberikan peringatan lisan atau bahkan dapat melakukan pengusiran terhadap pihak asing yang

¹⁹<https://www.hipwee.com/pulau-dikuasai-asing>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

²⁰<https://www.rilis.id/diusir-orang-asing-dinegeri-sendiri>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

bersangkutan sehingga kejadian yang dapat merugikan rakyat Indonesia dapat diminimalisasi.

UNCLOS 1982 merupakan payung hukum internasional yang dapat digunakan oleh setiap negara kepulauan di dalam mempertahankan kedaulatannya. Apabila pihak asing yang telah diberikan hak sewa atas pulau yang ada di Indonesia, maka pihak asing tersebut harus dapat mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan negara Indonesia. Berdasarkan UNCLOS 1982 dapat diketahui bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan atau *archipelagic state* yang memiliki kewenangan yuridis internasional atas semua pulau-pulau yang ada di dalam negara Indonesia.

B. Penyewaan Pulau di Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia Terhadap Pihak Asing Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Menurut Paul Laband dan George Jellinek bahwa adanya negara adalah merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin negara itu. Kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya suatu negara. Jadi jelaslah bahwa negara merupakan sumber dari kedaulatan.²¹

Negara Indonesia juga merupakan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.²²

Kewajiban Indonesia yang terpenting sebagai negara kepulauan adalah kewajiban melaksanakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perairan kepulauan, yaitu kewajiban memanfaatkan sumber daya alam hayati dan nonhayati di perairan kepulauan serta melaksanakan penegakan hukumnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tata cara pengelolaan wilayah laut yang difokuskan pada wilayah teritorial negara. Untuk itu dengan memperhatikan karakteristik, dan permasalahan wilayah kepulauan, serta kedudukan pengelolaan wilayah kepulauan, diperlukan kebijakan yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemanfaatan wilayah kepulauan secara optimal sekaligus mengatasi dan mencegah permasalahan pembangunan.

Penyewaan pulau kepada pihak asing baik dalam hal eksplorasi dan eksploitasi di perairan kepulauan tersebut, harus diupayakan melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa Indonesia, sehingga keuntungan besarnya dapat diperoleh bagi negara dan bangsa Indonesia sendiri. Pihak asing hanya memiliki hak pakai dan hak sewa.

Menurut Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa:

(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka

²¹Nimatul Huda, *op.cit*, hlm.170

²²JW. Muliawan, *op.cit*, hlm. 57.

penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.

- (2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.

Munculnya Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini malah mempermudah penguasaan asing atas pulau-pulau kecil. Pasal 26 A ini mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dalam skema investasi penanaman modal dengan dasar izin Menteri.

Hal ini dapat berdampak negatif bagi rakyat Indonesia. Misalnya peristiwa yang terjadi di Gili Sunut, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 109 keluarga tergusur karena investasi pulau kecil oleh PT *Blue Ocean Resort* asal Singapura.²³ Penerapan Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini malah membuat warga lokal kehilangan tanahnya dan pindah ke tempat lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa kebijakan penyewaan pulau khususnya kepada pihak asing melalui izin lokasi dan izin pengelolaan. Melalui sistem izin lokasi dan izin pengelolaan ini pemerintah mengharapkan penambahan pendapatan negara. Namun pemerintah

kurang mengorientasikan pengawasan dan penegakan hukum untuk meminimalisasikan dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem izin lokasi dan izin pengelolaan ini.

Pemberian hak sewa pulau kepada pihak asing ini dapat memacu ketidakadilan pada masyarakat lokal khususnya masyarakat lokal yang berprofesi sebagai nelayan lokal, petani tambak dan pembudi daya laut. Sistem izin lokasi dan izin pengelolaan ini dapat mencabut hak dan akses masyarakat lokal atas sumber daya alam dan pesisir sehingga secara otomatis masyarakat lokal tersebut terusir dengan sendirinya.

Sistem izin lokasi dan izin pengelolaan ini lebih memprioritaskan pengusaha asing di dalam penyewaan pulau karena sistem izin lokasi dan izin pengelolaan ini berorientasi pada keuntungan untuk menambah pendapatan negara. Pemberlakuan sistem izin lokasi dan izin pengelolaan ini juga secara alamiah dapat menggusur masyarakat lokal atau nomaden yang bermukim di pulau-pulau kecil tersebut. Seperti suku Bajo yang bermukim di pulau-pulau kecil dan pesisir Sulawesi hingga suku Laut di Kepulauan Riau. Suku nomaden ini kehidupannya bersimbiosis dengan alam (laut) untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa yang dapat mempunyai hak pakai ialah:

1. Warga negara Indonesia;
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

²³<http://www.mongabay.co.id>>16pulau-dikelola-asing, Diakses pada Tanggal 10 Mei 2019.

4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa orang asing tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik, hanya dapat memiliki hak pakai dan hak sewa. Tetapi tindakan beberapa oknum pihak asing yang menyewa pulau di Indonesia seperti memiliki hak milik. Salah satu contohnya ada beberapa orang Indonesia yang berkunjung ke sebuah pulau di pesisir selatan Sumatera Barat, kehadiran orang Indonesia ditolak oleh pihak asing yang menyewa pulau tersebut. Hal ini tentu menjadi pengalaman yang mengecewakan oleh orang Indonesia yang tidak dapat menginjakkan kaki di tanahnya sendiri.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:

“Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2”.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan: “Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik”. Ketentuan ini pada intinya hanya WNI yang dapat memiliki tanah atas pulau dengan status hak milik. Namun orang asing masih dapat menguasai pulau di Indonesia dengan status hak pakai dan hak sewa tanpa memperhatikan kepentingan WNI.

Di beberapa pulau di Indonesia telah disewakan pemerintah kepada pihak asing. Pemerintah menyewakan beberapa pulau ke pihak asing dengan alasan untuk mengoptimalkan

pengelolaan pulau-pulau di Indonesia khususnya pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Beberapa pulau yang telah disewakan kepada pihak asing adalah pulau Bakungan atau *Virgin Cocoa* di Berau Kalimantan Timur dan pulau di sekitar pulau Mentawai Sumatera Barat.

Pemberian izin hak sewa pulau kepada pihak asing seharusnya tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap pulau yang telah disewakan kepada pihak asing tersebut. Tetapi, pada kenyataannya ada beberapa oknum pihak asing yang semena-mena terhadap warga lokal sekitar pulau yang disewakan tersebut. Seperti diusirnya wisatawan lokal ke pulau Bakungan atau *Virgin Cocoa* di Berau Kalimantan Timur dan salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga diusir dari sebuah pulau di sekitar pulau Mentawai Sumatera Barat.

Pada Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan: “(1) Penguasaan dan pemilikan tanah di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat diketahui bahwa pulau-pulau yang disewakan kepada pihak asing diberikan hak atas tanah di pulau tersebut sebesar 70% dan tidak boleh menutup akses publik. Termasuk ketika warga lokal yang merupakan

warga negara Indonesia untuk mengunjungi pulau tersebut. Karena hak sewa atas tanah di pulau tersebut hanya sebesar 70% bukan keseluruhan pulau tersebut menjadi hak sewa pihak asing tersebut sedangkan 30% menjadi hak negara di dalam pengelolaannya. Tetapi, yang terjadi malah warga Indonesia yang datang ke pulau tersebut diusir oleh pihak asing yang seolah-olah seluruh pulau tersebut telah dikuasai oleh pihak asing.

Penyewaan pulau-pulau tersebut sebenarnya telah melanggar prinsip-prinsip negara kepulauan yang menekankan adanya keterpaduan antara matra darat, laut dan udara dalam melakukan pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim dan untuk kepentingan negara juga rakyat Indonesia berdasarkan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penyewaan pulau kepada pihak asing ini dapat menghilangkan keterpaduan antara matra darat, laut dan udara dalam melakukan pembangunan nasional untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Padahal para pendahulu bangsa Indonesia telah memperjuangkan secara gigih agar prinsip-prinsip negara kepulauan ini diakui oleh dunia internasional seperti yang sudah tertuang di dalam UNCLOS 1982.

Negara dalam hal ini pemerintah harus memiliki kebijakan publik mengenai hak sewa atas pulau khususnya untuk orang asing yang berkedudukan di Indonesia supaya amanat yang terdapat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

tetap dapat terlaksana dengan baik. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa bumi, air dan ruangan angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak pula bagi bangsa Indonesia. Jadi, tidak hanya menjadi hak pemiliknya saja. Demikian pula dengan pulau-pulau tidaklah semata-mata hanya menjadi hak rakyat asli dari pulau tersebut tetapi merupakan hak seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.²⁴ Kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.²⁵

Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai penyewaan pulau kepada pihak asing harus berdasarkan undang-undang. Walaupun, ada pulau-pulau yang disewakan kepada pihak asing tetapi harus tetap berada di bawah regulasi Pemerintah Indonesia dan pengelolaan pulau yang disewakan tersebut harus disesuaikan dengan prinsip lingkungan yaitu prinsip konservasi. Kemudian, kebijakan publik tersebut harus berpihak kepada kepentingan masyarakat Indonesia dan

²⁴Leo Agustino, *op.cit.*, 2008, hlm. 6.

²⁵Irfan Islamy, *op.cit.*, hlm.19.

menjamin dampak positif secara ekonomis untuk masyarakat tempatan pulau tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyewaan pulau di wilayah kedaulatan Republik Indonesia terhadap pihak asing berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 berupa hak pakai dan hak sewa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedaulatan negara Republik Indonesia. Pihak asing diberikan wewenang atas penyewaan pulau sebatas sebagai pengelola. Tetapi, sebagian oknum pihak asing telah melampaui wewenang yang diberikan sehingga merugikan masyarakat lokal yang merupakan rakyat Indonesia.
2. Penyewaan pulau di wilayah kedaulatan Republik Indonesia terhadap pihak asing berdasarkan hukum positif di Indonesia belum dapat mengakomodir kepentingan rakyat Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Penyewaan pulau ke pihak asing lebih berorientasi kepada mencari keuntungan untuk menambah pendapat negara dan secara alamiah menghilangkan hak-hak masyarakat lokal atas sumber daya alam perairan Indonesia.

B. Saran

1. Untuk masyarakat internasional, inilah saatnya untuk bergerak melampaui pemahaman kontemporer akan arti kedaulatan dalam sistem hukum internasional demi memungkinkan munculnya konsep-konsep baru mengenai legitimasi negara khususnya dalam hal penyewaan pulau.

2. Negara memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan pulaunya maka pulau tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan hanya untuk tujuan kemakmuran rakyat Indonesia. Setiap negara harus memperhatikan tindakannya khususnya di dalam mengelola penyewaan pulau kepada pihak asing sehingga tidak merugikan negara dan rakyat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2007, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Dahuri, Rohkmin, 2003, *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2012, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Huda, Nimatul, 2011, *Ilmu Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2009, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung.
- Muliawan, JW., 2009, *Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal-Sebuah Kajian Normatif untuk Keadilan bagi Masyarakat*, Jakarta, Bumi Aksara.

Cerdas Pustaka Publisher,
Jakarta.

B. Jurnal

Dini, Widia Ulan, Sudiarto dan Aris Munandar, 2017, Status Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah oleh Warga Negara Asing yang Diperoleh Melalui Pelelangan Obyek Hak Tanggungan, *Jurnal Hukum dan Keadilan IUS*, Vol. V No 2.

Jayanti, Vina dan I Nyoman Wita, 2011, Hak Warga Negara Asing Atas Penguasaan Tanah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4 No. 2.

Kurnia, Ida, 2008, Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2 No. 1.

Ogiso, 1987, Japan and the UN Convention on the Law of the Sea, *Journal Japan and International Law*, Vol. 25, No. 1.

C. Kamus

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2004, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3319.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5490.

United Nations Convention on the Law of the Sea Tahun 1982.

Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonnantie Tahun 1993.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

E. Website

<https://www.hipwee.com/pulau-dikuasai-asing>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

<https://www.rilis.id/diusir-orang-asing-dinegeri-sendiri>, Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018.

<http://www.mongabay.co.id>>16pulau-dikelola-asing, Diakses pada Tanggal 10 Mei 2019.